

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- , *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Andhi Nirwanto, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013
- Andhi Nirwanto, *Asas Kekhususan Sistematis Bersyarat Dalam Hukum Pidana Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2015
- Ardeno Kurniawan, *Korupsi di Indonesia; Keuangan Negara, Birokrasi dan Pengendalian Intern*, Penerbit BPFE Yogyakarta, 2015
- Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia, Badan LITBANG dan Diklat Kemenag RI*, 2010
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghaslia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minnesota, 1990.
- Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ermasjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Edisi Kedua, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2010.
- Hamid S.Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia; Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan, dan Menjernihkan Pemahaman* Jakarta, 1992.
- Hernold Ferry Makawimbang. *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Prenada Media Group, 2018
- Hafifah Sj. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, 1996.
- _____, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Perss, Jakarta, 2012
- H.M. Rahkmat, *Dimensi Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; Reorientasi Terhadap Hukum Pidana Administrasi dalam Pemberantasan Korupsi di Era Desentralisasi Fiskal*, Penerbit CV. Maulana Media Grafika, 2013

- H.B. Jacobini, *An Introduction to Comparative Administrative Law*, (New York: Oceana Publications Inc, 1991
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara)*, Pustaka Sinar Harapan 1993.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- _____, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Cetakan Pertama, Jakarta 2009
- _____, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, Jakarta, 2006.
- Irvan Mawardi, *Paradigma Baru PTUN, Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*, Yogyakarta, Thafa Media, 2016
- Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2011.
- _____, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa: Bandung, 2012
- Juni Sjafrien Jahja, *Say No to Korupsi : Mengenal, Mencegah, dan Memberantas Korupsi di Indonesia*, Visimedia, Jakarta, 2012
- Krisnajadi, *Bab-Bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1989.
- Joseph Goldstein dalam Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- Jeremi Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003
- Luhut M.P Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Adhoc; Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. ke-9, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*, 2008.
- Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1985
- Moelyatno, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1978
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Mahrus Hanafi, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015

- Marriam Webster, *New International Dictionary*, G&C Marriam Co. Publishers Springfield Mass USA, 1985
- Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Jakarta, 2012
- Marojahan JS Panjaitan, *Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2017
- Mia Amianti Iskandar, *Perluasan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOS 2000 dan UNCAC 2003*, Referensi, Jakarta, 2013
- Minarno Basuki Nur, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Palangkaraya* : Laksbang Mediatama, 2009
- Moch. Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, 2013
- Muhammad Yasin dkk, *Anotasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Jakarta: Universitas Indonesia – Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR), 2017
- Notohamidjojo, *Soal-Soal Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 1975.
- Peter Mahmud Marzuki, *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta 2010
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dilengkapi Dengan 4 Undang- Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta 2011
- Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Jakarta, 1996
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta 2006.
- Setiadi Wicipto., *Pokok-pokok Pikiran Terhadap Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan*, Makalah Seminar Naskah Akademik RUU Administrasi Pemerintahan, Kantor Kementerian PAN, 16 Desember 2004

- Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara (Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Pidana Khusus Korupsi*, Intrans Publishing-Setara Press, Malang, 2017.
- Satjipto Rahardjo, Pokok-Pokok Pikiran Memberantas Korupsi Secara Progresif. Disiapkan untuk *Anti-Corruption Summit* Fakultas Hukum UGM) Yogyakarta, 11-13 Agustus 2005
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006
- Slamet Suparjoto, “UU Administrasi Pemerintahan dan UU Peratun Berbanding Lurus”, dalam *Varia Peradilan*, Nomor 358 September 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 2015.
- Supandi, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana)”, Makalah tidak diterbitkan.
- Suhariyono AR, “*Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”, Artikel dalam *Jurnal Perspektif*, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2005
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993
- Usman Simanjatak, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1994
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2002

b. Disertasi dan Jurnal.

- Elwi Danil, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi; Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Firna Novi Anggoro, *Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, *Jurnal RechtsVinding*, Volume 11 Nomor 2, Agustus 2022.
- Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*, 2008, hlm. 1992.
- Guntur Hamzah, makalah “*Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun)*”. Disampaikan pada Seminar

Sehari dalam rangka HUT Peradilan Tata Usaha Negara ke-26 dengan tema: *Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun*, yang diselenggarakan di Hotel Mercure, Jakarta, 26 Januari 2016.

Harkristuti Harkrisnowo, "Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan", Artikel pada *Jurnal Keadilan* Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004.

Indriyanto Seno Adji, *Kendala Sanksi Hukum Pidana Administratif*, Jurnal Keadilan Volume 5 Nomor 1 Tahun 2011.

Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi", Makalah dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, FHUI, Jakarta, 1993

Mohammad Sahlan, *Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 23 April 2016.

Romli Atmasasmita, *Penyalahgunaan Wewenang oleh Penyelenggara Negara: Suatu Catatan Kritis atas UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Dihubungkan dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka H.U.T. IKAHI Ke-62 dengan tema Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Memperkuat atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi, Hotel Mercure, Ancol Jakarta, tanggal 26 Maret 2015.

Sidharta, *Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim*, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, PUSHAM UII, dan Norsk Senter For Menneskerettigheter Norwegian Centre For Human Rights, Hotel Grand Angkasa Medan, tanggal 2-5 Mei 2011.

Yulius, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)*, Artikel dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015, hlm. 375

C. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-undang Dasar Negara Indonesia, 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.

Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
Nomor 20 Tahun 2001 (Undang-Undang Nomor Pemberantasan Tipikor)

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Bagi
Pejabat Pemerintahan, Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Tahun 2016 No. 230, Tambahan Lembaran Negara No. 5943)

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4/2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam
Pengujian Penyalahgunaan Wewenang

Putusan Mahkamah Konsitusi RI Nomor 25/PUU-XIV/2016

